

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

SEKRETARIAT DITJEN PSDKP

Laporan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan dan capaian kinerja di
Triwulan II Tahun Anggaran 2025

KATA PENGANTAR

Kinerja organisasi wajib dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas fungsi yang dilaksanakan dan dituangkan dalam **Laporan Kinerja (Lkj)**. Hal tersebut sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LKj Sekretariat Ditjen. PSDKP triwulan II Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada Sekretariat Ditjen. PSDKP selama tahun anggaran berjalan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Pada triwulan II tahun 2025 atas kinerja yang telah ditorehkan dengan dinamika kebijakan pemerintah di awal tahun anggaran 2025, Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP sebesar **109,01%**. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh pimpinan dan pegawai Sekretariat Ditjen PSDKP. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sinergi dan kerjasamanya, semoga di periode selanjutnya tetap dapat mempertahankan sinergi dan kerjasama yang lebih baik.

Jakarta, Agustus 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Suharta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan II tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tertanggal 24 Januari 2025. Penyusunan LKj Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan II tahun 2025 merupakan kewajiban dan upaya memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan pada kurun waktu bersangkutan. Nilai kinerja organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan II tahun 2025 atas 33 indikator kinerja sebesar **109,01%** dengan rincian berikut:

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.1.1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP (nilai)	71,5	-	-	
ISK1.1.2	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai anggaran (%)	100%	-	-	
ISK1.1.3	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP (nilai)	92	85	97,59	114,81%
ISK1.1.4	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai IKPA (%)	100%	100%	100%	100%
ISK1.1.5	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP (nilai)	77	-	-	
ISK1.1.6	Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	95%	-	-	
ISK1.1.7	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81	74	82,95	112,09%
ISK1.1.8	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88	-	-	
ISK1.1.9	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,35	-	-	
ISK1.1.10	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%	100%
ISK1.1.11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	85%	85%	100%	117,65%
ISK1.1.12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	95%	100%	105,26%
ISK1.1.13	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5	-		
ISK1.1.14	Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP	88,5	80	93,27	112,37%
ISK1.1.15	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5	-		

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.1.16	Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%	100%
ISK1.1.17	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	-	-	
ISK1.1.18	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	-	-	
ISK1.1.19	Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100%	-	-	
ISK1.1.20	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	16	-	-	
ISK1.1.21	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	-	-	
ISK1.1.22	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	80	-	-	
ISK1.1.23	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78	-	-	
ISK1.1.24	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP	83	-	-	
ISK1.1.25	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	1	-	-	
ISK1.1.26	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	100%	-	-	
ISK1.1.27	Nilai implementasi program budaya kerja	70	-	-	
ISK1.1.28	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	60	-	-	
ISK1.1.29	Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80	-	-	
ISK1.1.30	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76%	76%	100%	120%
Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Efektif					
ISK1.2.1	Persentase implementasi kerja sama luar negeri	80%	-	-	
ISK1.2.2	Persentase dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani	80%	-	-	

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.2.3	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	-	-	

Dari 33 indikator sasaran kegiatan yang ditargetkan pada tahun 2025, sebanyak sembilan indikator sasaran kegiatan yang dihitung capaiannya pada triwulan II tahun 2025. Seluruh indikator yang dihitung capaiannya pada triwulan II telah berhasil mencapai target ditetapkan dengan lima indikator kategori istimewa dengan persentase capaian kinerja diatas 110% atas target ditetapkan.

Meskipun terdapat dinamika dalam kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP dengan program dukungan manajemen internal lingkup Ditjen PSDKP dapat dilaksanakan dengan baik, rencana penarikan dana sudah linier dengan realisasi anggaran setiap bulan. Secara umum tidak terdapat kendala pada kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan II tahun 2025.

DAFTAR ISI

- I KATA PENGANTAR**
- II RINGKASAN EKSEKUTIF**
- III BAB I PENDAHULUAN**
- IV BAB II PERENCANAAN KINERJA**
- V BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
- VI BAB IV PENUTUP**
- VII LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna mendukung implementasi ekonomi biru di Indonesia. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen PSDKP bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya laut serta menegakkan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan ekosistem perairan nasional.

Dalam mendukung tugas utama Ditjen PSDKP, Sekretariat Ditjen PSDKP memiliki fungsi yang sangat krusial, terutama dalam aspek perencanaan, administrasi, keuangan, koordinasi, serta pengelolaan sumber daya manusia dan logistik. Sekretariat berperan dalam memastikan efektivitas operasional serta optimalisasi anggaran guna mendukung berbagai program dan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan, seperti pemberantasan illegal fishing, penguatan pengawasan wilayah perairan, serta pengembangan teknologi pemantauan perikanan.

Pelaksanaan ekonomi biru sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan menuntut pengawasan yang lebih ketat serta sistem administrasi yang efisien dan responsif. Oleh karena itu, laporan kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai capaian, tantangan, serta efektivitas kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP dalam mengawal implementasi ekonomi biru.

Laporan ini akan mengevaluasi berbagai aspek kinerja, termasuk efektivitas tata kelola organisasi, efisiensi pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dalam sistem administrasi dan pengawasan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan penguatan peran Sekretariat Ditjen PSDKP dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Ditjen. PSDKP

telah menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP triwulan II tahun 2025 yang menginformasikan capaian kinerja selama periode bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP triwulan II tahun 2025 adalah:

- 1) Sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP kepada seluruh stakeholder.
- 2) Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

C. TUGAS dan FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas Sekretariat Ditjen. PSDKP adalah melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025, Sekretariat Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

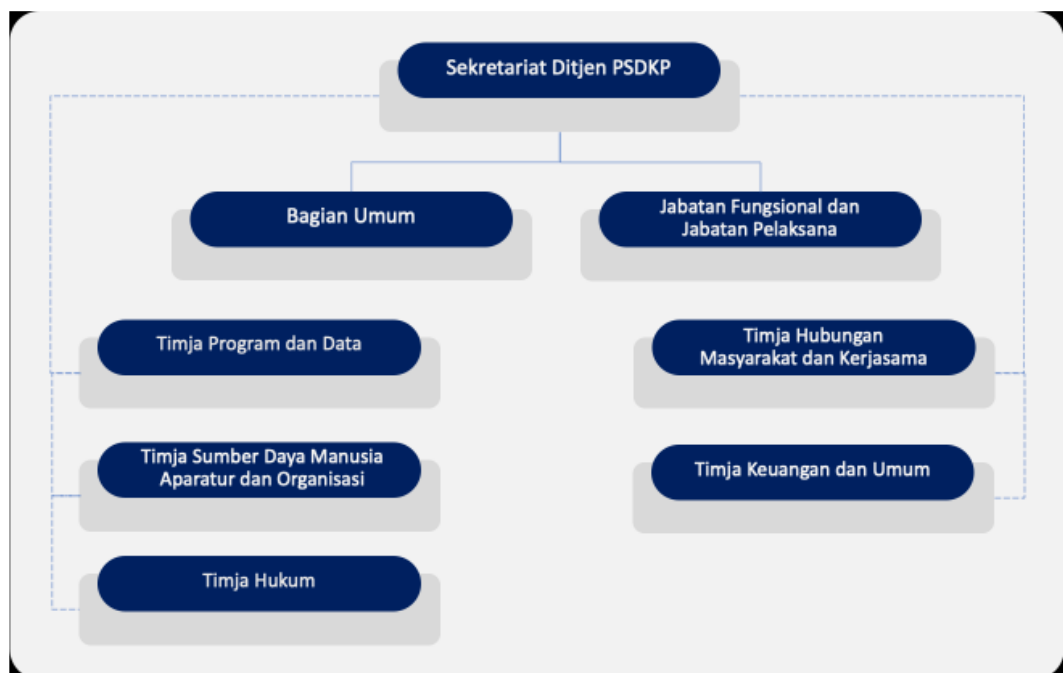
- e. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- h. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- j. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP maka struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP terdiri dari Kepala Bagian Umum, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.1432/PSDKP.1/KP.440/IV/2025 tanggal 8 April 2025 maka struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP ditambah Tim Kerja sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program dan Data
2. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
3. Tim Kerja Hukum
4. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
5. Tim Kerja Keuangan dan Umum

Struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP sebagaimana tersaji pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan II tahun 2025 secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Ditjen. PSDKP, serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan triwulan II tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP triwulan II tahun 2025 dan jika ada kendala kinerja, merekomendasikan perbaikan kinerja untuk periode berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RANCANGAN AWAL RENSTRA DITJEN PSDKP 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam proses penyusunan rencana strategis KKP tahun 2025-2029, sehingga penyusunan renstra Ditjen PSDKP menunggu pengesahan Renstra KKP.

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 belum ditetapkan. Dokumen perencanaan tersebut akan membahas tentang perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025 Sekretariat Ditjen PSDKP telah menyepakati dua Sasaran Kegiatan dan 33 indikator sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
Sasaran Kegiatan 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP			
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	71,5
2	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai anggaran (%)	%	100
3	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	92
4	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai IKPA (%)	%	100
5	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	77
6	Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	%	95
7	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	Indeks	81
8	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	Nilai	88
9	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	Nilai	3,35

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
10	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	%	100
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	%	85
12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	95
13	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	Nilai	<0,5
14	Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP	Nilai	88,5
15	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	88,5
16	Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	%	100
17	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100
18	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	70
19	Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	%	100
20	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Unit	16
21	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80
22	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	Nilai	80
23	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	Nilai	78
24	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP	Nilai	83

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
25	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	Unit	1
26	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	%	100
27	Nilai implementasi program budaya kerja	Nilai	70
28	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	Nilai	60
29	Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	Indeks	80
30	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	%	76
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Efektif			
31	Persentase implementasi kerja sama luar negeri	%	80
32	Persentase dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani	%	80
33	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	indeks	80

C. ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DUKUNGAN MANAJEMEN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Sekretariat Ditjen PSDKP. Isu-isu ini menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan serta implementasi kebijakan ekonomi biru. Beberapa permasalahan utama dalam dukungan manajemen antara lain:

1. Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi SDM Pengawasan (Polsus PWP3K, AKP, dan PPNS)
 - a. Keterbatasan kuantitas SDM berpengaruh pada kecepatan penanganan kasus pelanggaran baik pidana maupun administratif.
 - b. Keterbatasan dalam kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pemanfaatan teknologi pengawasan serta penerapan regulasi yang kompleks.
2. Belum Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengawasan SDKP terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memadai
 - a. Terbitnya PP 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membuat aturan teknis pengawasan SDKP mengalami penyesuaian

- b. NSPK yang seyogyanya diterapkan harus merujuk pada aturan turunan PP Nomor 28 tahun 2025 yang belum disahkan
 - c. Diperlukan percepatan dalam penyusunan NSPK agar pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat berjalan dengan tepat dan efektif.
3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Belum Tertib
- a. Tata kelola aset dan BMN dalam lingkup Ditjen PSDKP masih menghadapi kendala dalam hal pendataan, pemanfaatan, dan pemeliharaan.
 - b. Terdapat aset Ditjen PSDKP berupa tanah hasil pembelian Ditjen PSDKP yang belum dimanfaatkan (idle)
 - c. Terdapat aset hibah yang memerlukan revitalisasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai armada kapal pengawas mendukung operasi pengawasan SDKP

Isu-isu ini menjadi perhatian utama dalam peningkatan efektivitas pengawasan dan dukungan manajemen di lingkungan Ditjen PSDKP. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penyusunan regulasi yang lebih jelas, serta optimalisasi pengelolaan aset guna mendukung keberhasilan pengawasan kelautan dan perikanan.

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai salah satu komponen implementasi SAKIP dilaksanakan dengan klarifikasi data kinerja yang telah dicapai atas target yang telah ditetapkan, pembahasan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, disertai dengan verifikasi dan reuiu data kinerja. Penghitungan kinerja dilaksanakan secara berkala bagi indikator kinerja yang telah ditetapkan target interim. Untuk target yang ditetapkan dalam satu tahun maka penghitungan kinerja dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Untuk unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Ditjen PSDKP dan satker lingkup Ditjen PSDKP serta Dekonsentrasi, hasil penghitungan capaian kinerja diinput kedalam Sistem Aplikasi Pengelolaan kinerja (SAPK) KKP melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Hasil penghitungan capaian kinerja dituangkan ke dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis pembahasan merujuk PermenPAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Sekretariat Ditjen PSDKP telah menetapkan dua Sasaran Kegiatan yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dan Terselenggaranya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif dengan 33 indikator sasaran kegiatan. Pada triwulan II tahun 2025 atas kinerja yang telah ditorehkan, Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP mengalami peningkatan dari 108,85% menjadi **109,01%**. Secara detail capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan II tahun 2025

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.1.1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP (nilai)	71,5	-	-	
ISK1.1.2	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai anggaran (%)	100%	-	-	
ISK1.1.3	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP (nilai)	92	85	97,59	114,81%
ISK1.1.4	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai IKPA (%)	100%	100%	100%	100%
ISK1.1.5	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP (nilai)	77	-	-	
ISK1.1.6	Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	95%	-	-	
ISK1.1.7	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81	74	82,95	112,09%
ISK1.1.8	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88	-	-	
ISK1.1.9	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,35	-	-	
ISK1.1.10	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.1.11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	85%	85%	100%	117,65%
ISK1.1.12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	95%	100%	105,26%
ISK1.1.13	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5	-		
ISK1.1.14	Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP	88,5	80	93,27	112,37%
ISK1.1.15	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5	-		
ISK1.1.16	Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%	100%
ISK1.1.17	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	-	-	
ISK1.1.18	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	-	-	
ISK1.1.19	Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100%	-	-	
ISK1.1.20	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	16	-	-	
ISK1.1.21	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	-	-	
ISK1.1.22	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	80	-	-	

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.1.23	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78	-	-	
ISK1.1.24	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP	83	-	-	
ISK1.1.25	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	1	-	-	
ISK1.1.26	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	100%	-	-	
ISK1.1.27	Nilai implementasi program budaya kerja	70	-	-	
ISK1.1.28	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	60	-	-	
ISK1.1.29	Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80	-	-	
ISK1.1.30	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76%	76%	100%	120%
Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Efektif					
ISK1.2.1	Persentase implementasi kerja sama luar negeri	80%	-	-	
ISK1.2.2	Persentase dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani	80%	-	-	
ISK1.2.3	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	-	-	

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP sepanjang triwulan II tahun 2025 dituangkan dalam sembilan indikator sasaran kinerja yang dihitung capaiannya. Secara

lebih detail dijabarkan progres kinerja atas indikator kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP sebagai berikut:

ISK 1.1.1 Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP

Pengukuran indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang dilakukan atas perencanaan anggaran dilakukan dengan sistem melalui Aplikasi MONEV Kemenkeu berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektifitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Aspek efektifitas sebesar 75 yang terdiri dari Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dengan bobot 30 dan Nilai efektifitas Satker dengan bobot 45. Selanjutnya untuk aspek efisiensi sebesar 25 (penggunaan SBK 10% dan Efisiensi SBK 15%) yang diperoleh dari nilai efisiensi Satker. Target dari indikator NKPA Ditjen PSDKP Tahun 2025 adalah sebesar 81,5 dan dihitung pada akhir tahun anggaran.

Hingga triwulan II Tahun 2025, Capaian NKPA Ditjen PSDKP masih belum dapat dihitung maksimal karena sebagian volume target output (TVRO) baru bisa dicapai pada akhir tahun. Progres rata-rata capaian Output sampai dengan TW II baru sebesar 27,4%, dimana 15 RO sudah tercapai (progress = 100%) 442 RO dalam proses (0 < progress < 100%), 125 RO belum ada proses (progress = 0%). Untuk efisiensi penggunaan SBK masih kecil yaitu sebesar 3,1 karena sebagian RVRO masih nol sehingga masih belum bisa tergambar nilai efisiensi secara keseluruhan.

Adapun kendala yang dijumpai selama Triwulan II Tahun 2025 adalah SDM pelaporan di Satker yang mengalami pergantian dan harus kembali diberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi tentang pelaporan dan penginputan capaian volume realisasi output di Aplikasi SAKTI dan monitoring penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) pada Aplikasi Monev Kemenkeu.

Untuk meningkatkan capaian NKPA Tahun 2025 perlu dilakukan upaya perbaikan sekaligus rencana kegiatan pada periode berikutnya, antara lain :

1. Melakukan Sosialisasi proses pelaporan dan penginputan capaian volume realisasi output (CVRO) di Aplikasi SAKTI dalam rangka untuk meningkatkan capaian pada aplikasi Monev Kemenkeu.

2. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian output dan penggunaan SBK pada aplikasi Monev Kemenkeu terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP.

ISK 1.1.2 Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai kinerja perencanaan anggaran

Untuk triwulan II tahun 2025 masih dilakukan pemantauan nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP. Terkait kelengkapan data dukung nilai kinerja perencanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran, rencana penarikan dana, laporan capaian output program dan RKA-K/L dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran lingkup Ditjen PSDKP disajikan setiap pekan pada hari senin untuk memantau kondisi pergerakan anggaran, nlokir, outstanding kontrak dan sisa anggaran
2. Rencana penarikan dana dapat dipantau pada aplikasi OMSPAN Ditjen PSDKP setiap saat dan dilakukan penyesuaian RPD setiap triwulan berdasarkan realisasi anggaran terakhir
3. Laporan capaian output program belum dapat dilaporkan pada triwulan II karena sebagian besar output baru tercapai pada akhir tahun, serta capaian kinerja indikator kinerja Program (IKP) Ditjen PSDKP baru akan dilaporkan pada akhir tahun anggaran setelah penghitungan kinerja
4. RKA-K/L Ditjen PSDKP dapat diakses pada aplikasi SAKTI Ditjen PSDKP setiap saat

Tidak ada kendala dalam penyiapan kelengkapan data dukung nilai kinerja perencanaan anggaran.

ISK 1.1.3 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP

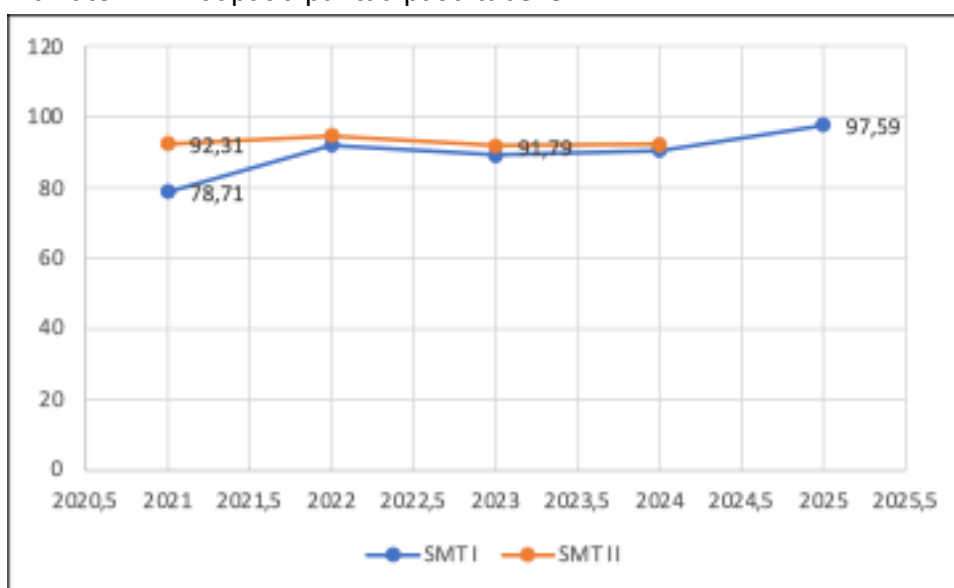
Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat delapan indikator kinerja yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerapan anggaran dan capaian output. Realisasi kinerja atas indikator kinerja pelaksanaan anggaran semester I tahun 2025 Ditjen PSDKP tersaji pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP				
Tahun	TW II		TW IV		Capaian
	T	R	T	R	
2025	85	97,59	92	-	100%
2024	83	90,48	93,76	92,13	98,26%

Indikator kinerja	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP				
Tahun	TW II		TW IV		Capaian
	T	R	T	R	
2023	-	89,14	93,75	91,79	97,91%
2022	80	91,95	89	94,56	106,25%
2021	80	78,71	89	92,31	103,72%

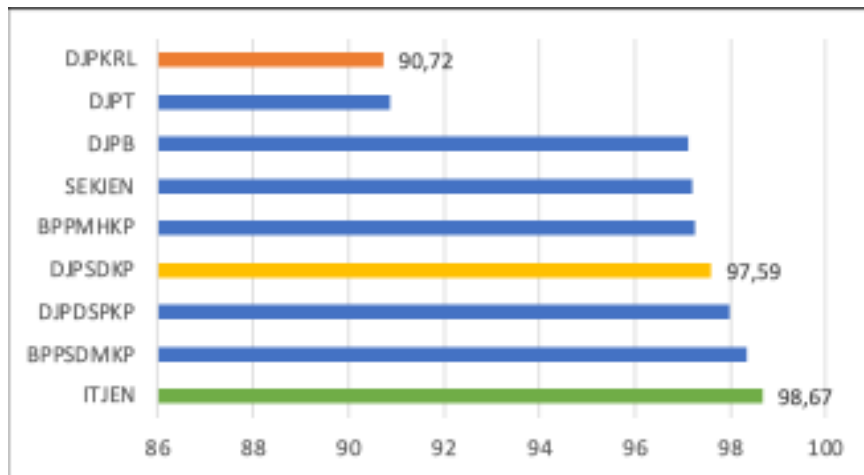
Indikator kinerja ini dihitung capaian kinerjanya pada semester I dan II tahun 2025 dan untuk Sekretariat Ditjen PSDKP baru mengampu indikator IKPA Ditjen PSDKP tahun 2025, namun demikian untuk periode sebelumnya indikator IKPA dapat dipantau pada tabel 3.2



Gambar 3.1 Grafik indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP

Dari gambar 3.1 dapat dilihat terdapat tren meningkat pada capaian IKPA semester I menuju ke semester II setiap periode tahun anggaran dengan percepatan kinerja tertinggi saat ini pada tahun 2021 dari 78,71 ke 92,31. Untuk tahun 2025 per semester I tahun 2025 target tahunan sebesar 92 dapat tercapai dengan baik, namun demikian kinerja pelaksanaan anggaran akhir tahun 2025 tetap harus memperhatikan strategi penyerapan anggaran, strategi efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan standar biaya khusus.

Untuk lingkup KKP pada semester I tahun 2025 capaian kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi pada Inspektorat Jenderal KKP sedangkan yang paling rendah pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Capaian tersebut memperhatikan jumlah Satker pada masing-masing unit kerja dimana Inspektorat Jenderal PSDKP terdiri dari satu Satker sedangkan unit kerja eselon I lain terdiri lebih dari satu Satker. Untuk gambaran realisasi kinerja dapat dilihat pada gambar 3.2



Gambar 3.2 Grafik indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup KKP Semester I Tahun 2025

Secara detail realisasi kinerja IKPA semester I tahun 2025 disajikan pada gambar 3.3. Dari gambar 3.3 dapat dilihat Deviasi halaman III DIPA dan Pengelolaan UP dan TUP sudah memadai meskipun belum maksimal.

MONEVPA

hal-hat

hal-hat

DITJEN PENGAWAS...
14 JUN 2025

Excel

PDF

FILTER

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER

SAMPAI DENGAN 1 JUNI

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE ES1	NAMA ES1	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DIPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.52	97.06	100.00	100.00	97.48	100.00	97.59	100%	0.00	97.59
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.43	19.41	10.00	10.00	9.75	25.00				
			Nilai Aspek		94.76			98.64		100.00				

Gambar 3.3 Tangkap layar pemantauan IKPA Ditjen PSDKP semester I Tahun 2025

1. Untuk revisi DIPA Ditjen PSDKP sepanjang triwulan II tahun 2025 sebanyak dua kali yaitu untuk revisi tunggalkan pesawat dan buka blokir PNBP. Seluruh upaya revisi DIPA telah diselesaikan sebelum triwulan II berakhir.
2. Deviasi halaman III DIPA telah terdapat devisiasi sebesar 10,48, dimana terdapat perbedaan dari pagu yang direncanakan dengan realisasi anggaran.
3. Penyerapan anggaran tidak menjumpai kendala karena pada triwulan II tahun 2025 realisasi anggaran sesuai dengan RPD ditetapkan
4. Belanja kontraktual tidak mengalami kendala.
5. Tagihan yang muncul selama triwulan II sudah dibayarkan tepat waktu
6. Untuk pengelolaan UP dan TUP tidak ada kendala karena seluruh pertanggungjawaban/pembayaran dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Untuk capaian output periode triwulan II tahun 2025 sebesar 25 atau recapai maksimal (100).

Sebagai upaya perbaikan untuk mengurangi deviasi Halaman III DIPA dan pengelolaan UP/TUP akan diingatkan kepada Satker lingkup Ditjen PSDKP agar melakukan penyesuaian Halaman III DIPA dan ketepatan dalam penyelesaian UP/TUP pada Satker lingkup Ditjen PSDKP

ISK 1.1.4 Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung IKPA

Untuk triwulan II tahun 2025 masih dilakukan pemantauan nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP. Terkait kelengkapan data dukung nilai kinerja perencanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran, rencana penarikan dana, laporan capaian output program dan RKA-K/L dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran lingkup Ditjen PSDKP disajikan setiap pekan pada hari senin untuk memantau kondisi pergerakan anggaran, nlokir, outstanding kontrak dan sisa anggaran
2. Rencana penarikan dana dapat dipantau pada aplikasi OMSPAN Ditjen PSDKP setiap saat dan dilakukan penyesuaian RPD setiap triwulan berdasarkan realisasi anggaran terakhir
3. Laporan capaian output program belum dapat dilaporkan pada triwulan II karena sebagian besar output baru tercapai pada akhir tahun, serta capaian kinerja indikator kinerja Program (IKP) Ditjen PSDKP baru akan dilaporkan pada akhir tahun anggaran setelah penghitungan kinerja
4. RKA-K/L Ditjen PSDKP dapat diakses pada aplikasi SAKTI Ditjen PSDKP setiap saat

Tidak ada kendala dalam penyiapan kelengkapan data dukung nilai kinerja perencanaan anggaran.

ISK 1.1.5 Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik telah diluncurkan oleh Kementerian PAN dan RB pada Maret 2025, dan telah dilakukan sosialisasi ketentuan Kompetisi Lomba ke Seluruh K/L. Direktorat Jenderal PSDKP telah mengikuti Sosialisasi dan telah di sampaikan ke Seluruh Unit Kerja untuk mengikuti Kompetisi Inovasi melalui Surat Nomor : 632/PSDKP.1/OT.730/IV/2025 Tanggal 29 April 2025. Saat ini tengah dilakukan identifikasi inovasi yang memenuhi kriteria dan akan diikutsertakan ke KIPP. Identifikasi awal adalah inovasi terkait Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat. Kendala yang dijumpai dalam identifikasi inovasi adalah

pengumpulan bahan dukung untuk KIPP masih belum memadai bahan dukung standar.

ISK 1.1.6 Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP

Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan didukung oleh anggaran belanja pegawai, barang dan modal dengan pagu anggaran dan realisasi sebagaimana tercantum pada tabel 3.2

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2025

APBN	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu RM	197.743.333.000	609.438.993.000	19.926.437.000	827.108.763.000
Realisasi	110.481.367.125	114.034.481.917	472.770.723	224.988.619.765
%	55.87%	18,71%	2.37%	27,20%

Hingga triwulan II tahun 2025 telah terealisasi anggaran sebesar Rp224.988.619.765,00 dari pagu Rp827.108.763.000,00 atau sebesar 27,20%. Jika melihat Rencana Penarikan Dana (RPD) Ditjen PSDKP maka dapat dilihat pada triwulan II tahun 2025 realisasi anggaran Ditjen PSDKP diatas RPD yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dari pagu tersebut terdapat anggaran blokir efisiensi sebesar Rp185.591.225.000,00 sehingga total pagu efektif ditjen PSDKP adalah sebesar Rp. 641.517.508.000,-. Anggaran tersebut kemudian didistribusikan pada 5 (lima) unit kerja pada satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP, 15 satker Dekonsentrasi, dan 34 (tiga puluh empat) satker Tugas Pembantuan. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. **224.988.619.765,-** atau sebesar 27,20% secara aktual **atau 35,08% (pagu efektif)**.

Tabel 3.4 Monitoring Realisasi dan Rencana Penarikan Dana Ditjen PSDKP tahun 2025

Bulan	RPD (Rp)	Realisasi (Rp)	RPD Akumulatif (Rp)	Relisasi Akumulatif (Rp)
Januari	13.761.138.270	8.940.268.166	13.325.488.654	8.940.268.166
Februari	30.235.894.806	31.423.542.455	43.561.383.460	40.363.810.621
Maret	41.249.638.267	52.939.981.003	84.811.021.727	93.303.791.624
April	34.028.863.675	29.389.669.055	118.839.885.402	122.693.460.679
Mei	47.297.519.882	32.772.494.622	166.137.405.284	155.465.955.301
Juni	64.011.291.534	69.522.664.464	230.148.696.818	224.988.619.765
Juli	61.002.759.838	0	291.151.456.656	-
Agustus	56.970.857.557	0	348.122.314.213	-

Bulan	RPD (Rp)	Realisasi (Rp)	RPD Akumulatif (Rp)	Relisasi Akumulatif (Rp)
September	59.574.867.581	0	407.697.181.794	-
Oktober	76.568.849.550	0	484.266.031.344	-
November	93.687.017.436	0	577.953.048.780	-
Desember	248.720.064.604	0	826.749.718.746	-

Untuk mencapai target penyerapan anggaran sebesar 95% pada akhir tahun 2025, maka direkomendasikan untuk mengajukan usulan revisi anggaran buka blokir agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Lebih lanjut, terkait RPD yang telah disusun dapat dilakukan penyesuaian sehingga deviasi RPD dan realisasi anggaran Ditjen PSDKP tidak terlalu jauh, yang dapat mempengaruhi sub indikator deviasi halaman III DIPA pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

ISK 1.1.7 Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP

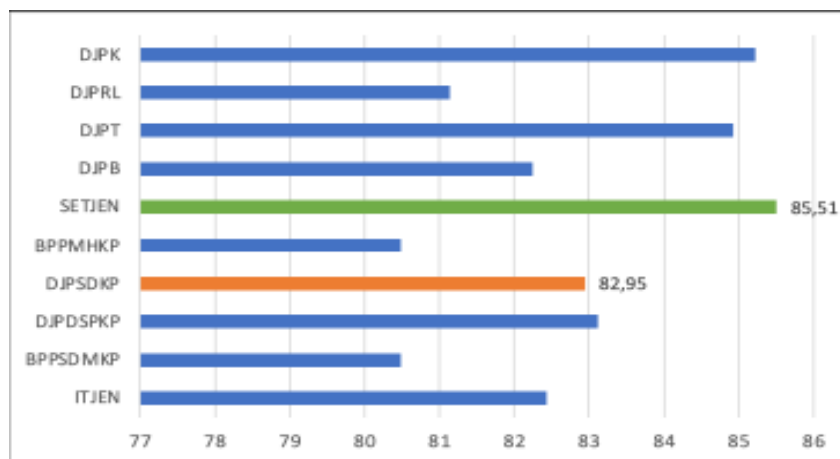
Indeks Profesionalitas ASN mendeskripsikan kualitas anggota profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang berkerja pada instansi pemerintah. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada semester I dan II tahun anggaran 2025 dan dapat dipantau capaian kinerjanya pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn#/ip-asn/eselon>. Realisasi IP ASN Ditjen PSDKP pada triwulan II Tahun 2025 dijabarkan pada tabel 3.5

Tabel 3.5 Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP					
Tahun	Target	TW II		TW IV		Capaian
		T	R	T	R	
2020	72	-	-	72	74,39	103,32%
2021	73	65	62,41	73	77,91	106,72%
2022	77	70	71,63	77	80,55	104,61%
2023	78	71	74,98	78	87,50	112,18%
2024	82	77	83,54	82	87,25	106,40%
2025	81	74	82,95	81	-	112.09%

Kinerja Indeks Profesionalitas ASN secara umum tercapai di atas target, hal ini karena adanya penyesuaian penghitungan bobot dimensi sebagaimana lampiran surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 tanggal 20 Juni 2024, sumber data yang digunakan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga validitas data lebih terjamin.

IP ASN Ditjen PSDP sebesar 82,95 dengan deviasi sebesar 2,56 terhadap Sekretariat Jenderal KKP sebagai unit kerja dengan IP ASN tertinggi lingkup KKP pada semester I tahun 2025 sebagaimana tersaji pada gambar 3.4 Posisi berikutnya untuk IP ASN terbaik pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ditjen Perikanan Tangkap dengan IP ASN sebesar 85,22 dan 84,93.



Gambar 3.4 Grafik IP ASN unit kerja lingkup KKP semester I Tahun 2025

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang upaya peningkatan kompetensi pegawai diantaranya sebagai berikut:

1. Ngobras (Ngobrol Cerdas Bareng Setditjen PSDKP) yang menghadirkan obrolan santai dan diskusi secara daring seputar kesekretariatan selama 3 jam. Pada triwulan II tahun 2025 sudah terdapat tiga edisi Ngobras dengan tema yaitu:
 - a. “Pengembangan Kompetensi ASN dan Uji Kompetensi”
 - b. “Rumus Praktis Jago Nulis dan Deteksi Berita Bohong”
 - c. “Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Ditjen PSDKP”
2. Pelatihan yang dilaksanakan melalui metode *synchronous* yang dilakukan secara daring seputar teknis pengawasan kelautan dan perikanan. Pada triwulan II tahun 2025 sudah terdapat beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi eksternal maupun unit kerja lingkup Ditjen PSDKP sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Daring ECOSOLVE OSINT Workshop.
 - b. Sharing Pengoperasian Drone dan Pemetaan dengan QGIS.
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043.
3. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2026 lingkup Ditjen PSDKP, tanggal 17 Juni 2025.

4. Diklat Dasar Asisten Pengawas Perikanan Terampil sebanyak 4 Angkatan yang diikuti oleh sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta, pelaksanaan kegiatan pada tanggal 17 s/d 30 Juni 2025.
5. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025, dengan rincian peserta dilantik sebagai berikut:
 - a. 9 Pejabat Administrator setara eselon III.
 - b. 5 Pejabat Pengawas setara eselon IV.
 - c. 1 Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda.

Selain upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai juga dilakukan melalui pengembangan kompetensi pegawai dan peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN individu pegawai karena perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional berdasarkan riwayat sertifikasi di menu “kursus” dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai serta melakukan monitoring presensi pegawai sebagai upaya memantau tingkat kedisiplinan pegawai.

ISK 1.1.8 Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang dikenal sebagai SAKIP, tahun 2025 kembali menjadi salah satu indikator pada unit kerja Sekretariat Ditjen PSDKP dengan target Penilaian Mandiri SAKIP sebesar 88. Indikator yang dihitung pada triwulan III tahun 2025 ini sudah diimplementasikan di lingkungan Sekretariat Ditjen PSDKP sepanjang triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 di unit kerja lingkup Ditjen PSDKP untuk Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan sebagai Unit Eselon II baru.
2. Fasilitasi revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 untuk pergantian Kelapa Unit Kerja di UPT PSDKP
3. Melakukan pengukuran dan verifikasi data capaian Kinerja pada lingkup Satker Ditjen PSDKP
4. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja TW I Tahun 2024 lingkup Ditjen PSDKP
5. Pendampingan revisi anggaran sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 untuk efisiensi anggaran
6. Penyusunan Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

ISK 1.1.9 Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP

Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah merupakan indikator yang dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran dengan implementasi di sepanjang tahun anggaran. Upaya yang telah dilakukan sebagai wujud implementasi nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP sepanjang Triwulan II TA 2025 adalah menindaklanjuti Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.09.02/S-323/D1/04/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025. Upaya yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti hal tersebut yaitu;

1. Melakukan penyusunan surat tugas tim asesor penilaian maturitas;
2. Melakukan rapat teknis tim asesor dan pengisian kertas kerja dengan seluruh tim; dan
3. melakukan pemenuhan dokumen penilaian mandiri maturitas SPIP Ditjen PSDKP TA 2025.

Dokumen yang dipenuhi dan dinilai terdiri dari:

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | Sub Unsur 4.1.1 | Informasi yang relevan |
| 2 | Sub Unsur 4.1.2 | Pembangunan sistem pengaduan |
| 3 | Sub Unsur 4.1.3 | Strategi dan kebijakan manajemen risiko |
| 4 | Sub Unsur 4.1.4 | register risiko dan rencana tingkat pengendalian |
| 5 | Sub Unsur 4.2 | Komunikasi yang efektif |
| 6 | Sub Unsur 5.1 | Pemantauan berkelanjutan |
| 7 | Sub Unsur 5.2 | Evaluasi terpisah |

Dari dokumen atas tujuh sub unsur yang harus dipenuhi dan dilengkapi sampai dengan akhir Triwulan II capaian yang telah diraih sebesar 91% dengan nilai 4.6 dari total 215 hasil pengujian kertas kerja Struktur dan Proses. Atas kekurangan dokumen sebesar 9% akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya. Kendala dalam pengisian kertas kerja yaitu rencana strategis yang belum pasti sehingga dasar untuk penghitungan penetapan dan pencapaian tujuan belum jelas.

ISK 1.1.10 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Pengendalian kegiatan berbasis risiko telah diimplementasikan oleh Ditjen PSDKP sejak periode Renstra 2020-2024 pada unit kerja dibawahnya dan dilanjutkan pada periode Renstra berikutnya. Sebagai indikator kinerja yang dihitung capaiannya setiap triwulan maka berikut disajikan realisasi kinerja indikator dimaksud pada tabel 3.6

Tabel 3.6 realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Ditjen PSDKP					
Tahun	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
2025	85%	100%	100%	-	-	100%

Pada periode sebelumnya di tahun 2023 dan 2024, persentase pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko dilaksanakan di unit kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP namun pada tahun 2025 pada Perjenjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP, indikator kinerja tersebut dilaksanakan di lingkup Ditjen PSDKP. Berdasarkan surat dinas Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.2332/PSDKP.1/OT.710/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 Hal Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2025 lingkup Ditjen PSDKP mendapatkan capaian 100%. Nilai tersebut dilihat dari total rencana pengendalian risiko sebanyak 257 yang telah direalisasikan seluruhnya.

Selama triwulan II tahun 2025, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. penyampaian surat permintaan penyusunan laporan SPIP dan pemantauan MR
2. Melakukan rekap capaian indikator persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko pada unit kerja lingkup Ditjen PSDKP di triwulan II tahun 2025

Sebagai kendala terdapat kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan karena kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan nomenklatur organisasi, sehingga beberapa kegiatan memerlukan addendum manajemen risiko.

ISK 1.1.11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP

Rekomendasi hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan mitra Ditjen PSDKP adalah Inspektorat II KKP, maka walaupun perhitungan kinerja dilakukan triwulanan namun sudah melakukan pemantauan pendahuluan untuk tindak lanjut rekomendasi sebanyak dua kali di bulan Februari dan Maret. Realisasi kinerja indikator dimaksud disajikan pada tabel 3.7

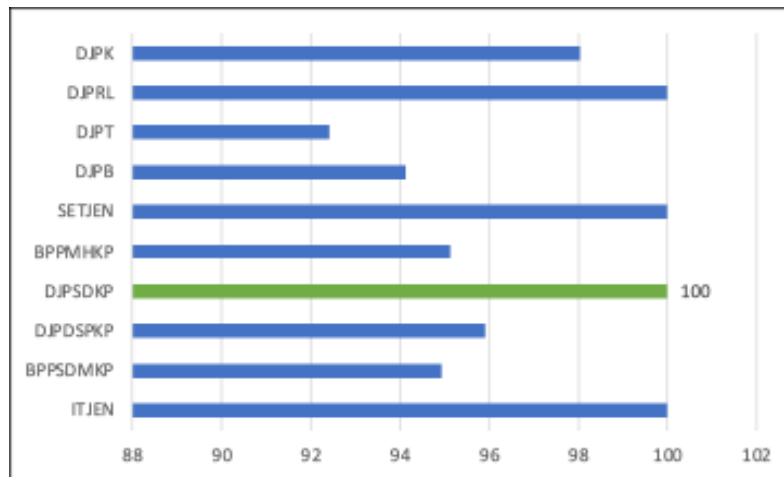
Tabel 3.7 Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP									
Tahun	Target %	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
		T	R	T	R	T	R	T	R	
2025	85	85	100	85	100	85	-	85	-	117,65%
2024	80	80	95	80	99,19	80	90,98	80	100	120%
2023	75	75	100	75	95,83	75	92,38	75	100	120%
2022	70	70	46,81	70	95,10	70	96,99	70	99,11	120%
2021	65	65	89,80	65	93,09	65	95,16	65	89,16	120%
2020	60	15	37,93	30	62,65	45	61,72	60	74,04	120%

Dari tabel 3.5 dapat dilihat pada triwulan II Ditjen PSDKP mampu mempertahankan performa kinerja sejak akhir tahun 2024 untuk upaya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Hal ini tak lepas dari upaya pengendalian yang mendapat perhatian pimpinan unit kerja Satker lingkup Ditjen PSDKP.

Perbaikan kinerja Ditjen PSDKP salah satunya dapat dilihat dari hasil pengawasan internal/APIP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP. Berdasarkan surat dinas Inspektorat II Itjen KKP kepada Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor R.224/ITJ.2/HP.550/VI/2025, 7 Juli 2025 Hal Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP kepada Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor 669/ITJ.0/RC.610/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 Hal Revisi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan II Tahun 2025 dapat disampaikan bahwa sesuai dengan *database* tindak lanjut hasil pengawasan Itjen KKP (<https://sidak.kkp.go.id>), Ditjen PSDKP telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Itjen KKP sebanyak 161 rekomendasi, sehingga capaian Ditjen PSDKP periode Triwulan II sebesar 100%.

Untuk lingkup KKP, Ditjen PSDKP menempati posisi sama dengan tiga unit kerja lainnya dengan predikat tuntas 100% yaitu Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal KKP sebagaimana tersaji pada gambar 3.5 ini menunjukkan keseriusan upaya perbaikan unit kerja atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkup KKP.



Gambar 3.5 Grafik upaya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan lingkup KKP Semester I Tahun 2025

Selama triwulan II tahun 2025, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring aplikasi SIDAK KKP atas laporan hasil pengawasan (LHP) yang telah diterbitkan oleh Itjen KKP.
2. Melakukan rapat monitoring progres tindak lanjut atas temuan Itjen KKP. Untuk perhitungan capaian Triwulan II tidak terdapat kendala dalam penyelesaiannya

ISK 1.1.12 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Selain lingkup Ditjen PSDKP, indikator kinerja yang diampu untuk upaya tindak lanjut hasil rekomendasi APIP yang telah lengkap dan disampaikan kepada APIP adalah di lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP. Realisasi atas indikator kinerja dimaksud disajikan pada tabel 3.8

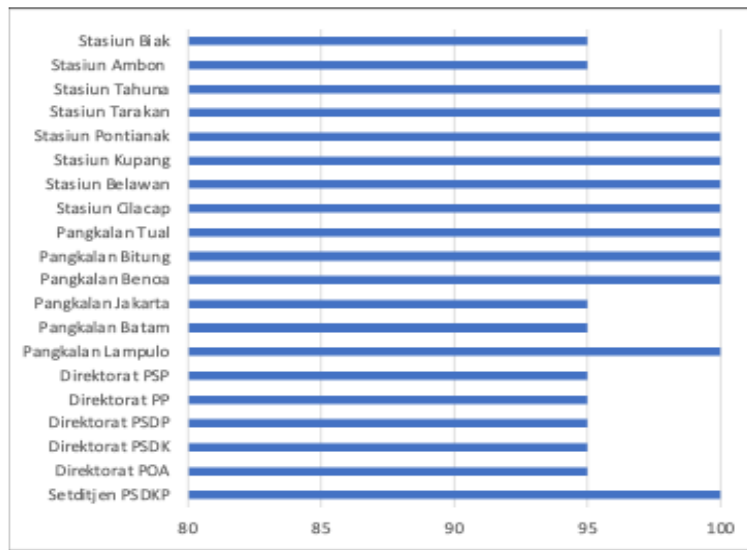
Tabel 3.8 Realisasi Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan									
Tahun	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
		T	R	T	R	T	R	T	R	
2025	95	95	100	95	100	95	-	95	-	105,26%

Indikator kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan									
Tahun	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
		T	R	T	R	T	R	T	R	
2024	80	80	95	80	100	80	100	80	100	120%
2023	75	75	100	75	94,59	75	93,62	75	100	120%
2022	70	70	40,74	70	87,50	70	94,29	70	96,72	120%
2021	65	65	44,44	65	90,90	65	78,12	65	60,94	120%
2020	60	15	15	30	83,33	60	66,67	60	83,33	120%

Laporan Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP adalah sebanyak 58 LHP dan keseluruhan LHP tersebut telah tuntas ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor B.2306/DJPSDKP.1/TU.140/VII/2025 tanggal 10 Juli Hal Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” lingkup Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2025.

Sebagai upaya penyelesaian tindak lanjut atas 58 rekomendasi tersebut Sekretariat Ditjen PSDKP melakukan dua kali rapat pemantauan tindak lanjut yaitu pada tanggal 5 Juni 2025 dan 25 Juni 2025. Melihat gambar 3.6 dapat dilihat pada unit kerja lain lingkup Ditjen PSDKP yang mendapatkan rekomendasi hasil pengawasan juga telah berupaya penuh untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Dari lima belas Satker, sebelas Satker menjadi bagian program pengawasan dan audit internal Inspektorat II KKP, serta telah tuntas seluruhnya dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.



Gambar 3.6 Grafik upaya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan lingkup Ditjen PSDKP Semester I Tahun 2025

Perhitungan capaian Triwulan II tahun 2025 tidak menjumpai kendala dalam penyelesaiannya, dikarenakan Satker pemilik temuan telah berkoordinasi aktif dengan Tim Auditor terkait penyelesaian yang harus dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik.

ISK 1.1.13 Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP

Laporan Keuangan atas penyelenggaraan program kegiatan yang didukung oleh APBN secara rutin dan berkesinambungan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pemeriksaan laporan keuangan tahun 2024 berdasarkan kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dari target kurang dari 0,5 nilai batas tertinggi temuan atas pemeriksaan laporan keuangan Ditjen PSDKP oleh BPK tahun 2025 sebesar <0,5%. Pada triwulan II ini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki temuan kepatuhan senilai Rp181.967.356,00. Temuan tersebut didapatkan dari Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp8.543.931,00 dan Sewa kendaraan roda 4 tidak sesuai ketentuan senilai Rp173.423.425,00. Atas temuan kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas

negara senilai Rp8.543.931,00 sedangkan untuk temuan sewa kendaraan roda 4 tidak sesuai ketentuan masih dalam proses tindak lanjut.

ISK 1.1.14 Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP

Ditjen PSDKP selain melaksanakan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan juga memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa.

Layanan publik yang dilaksanakan diantaranya berupa 1) pemberian akses pemantauan kapal perikanan, 2) penerbitan surat keterangan aktivasi transmitter, 3) analisis pergerakan kapal perikanan, dan 4) penerbitan Surat Laik Operasi (SLO), yang dievaluasi setiap triwulan oleh para pengguna jasa melalui survey kepuasan masyarakat. Upaya pelayanan publik yang prima tertuang pada indikator kinerja lingkup Ditjen PSDKP baik Pusat di Direktorat Pengendalian Operasi Armada dan UPT PSDKP. Realisasi indikator kinerja dimaksud lingkup Ditjen PSDKP disajikan pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Realisasi nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP									
Tahun	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
		T	R	T	R	T	R	T	R	
2025	88,5	80	92,24	83	93,27	86	-	88,5	-	112,37%

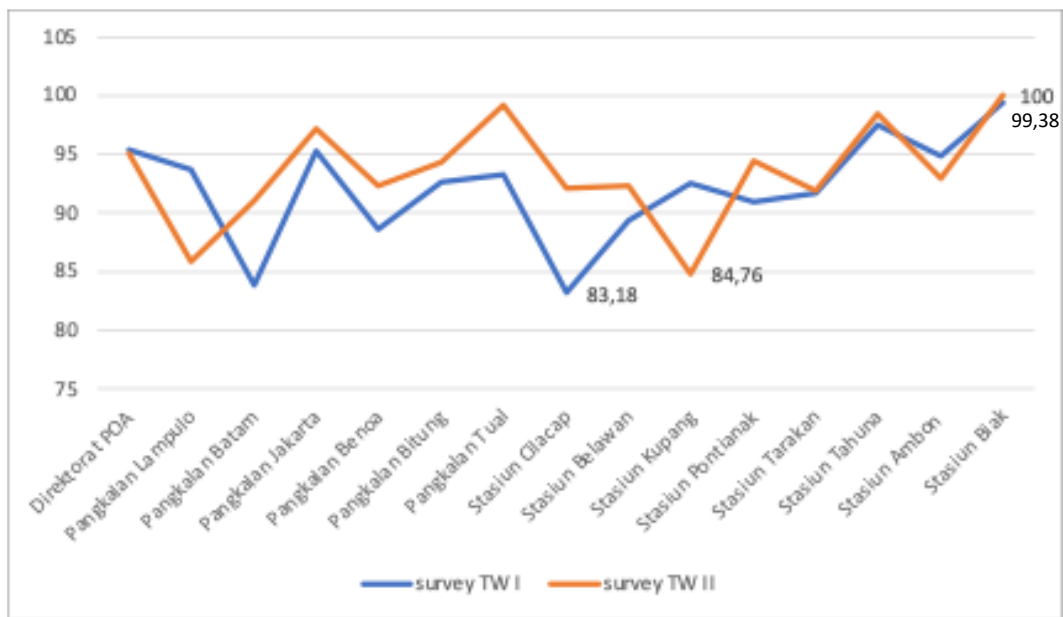
Tahun 2025 menjadi periode pertama jenis layanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI) tidak lagi disediakan karena tidak ada lagi pengguna jasa yang mengajukan permintaan penerbitan LVHPI. Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik lingkungan KKP tertanggal 30 April 2025, jenis layanan penerbitan LVHPI dan analisis pergerakan kapal sudah tidak tercantum. Sehingga selaras dengan ketentuan yang berlaku Ditjen PSDKP tidak lagi memberikan layanan tersebut dan memberikan jenis layanan lainnya sesuai ketentuan berlaku mulai triwulan III tahun 2025 yaitu 1) persetujuan penyedia transmitter dan 2) hasil pemeriksaan kapal (HPK) kedatangan. Untuk layanan baru tersebut diimplementasikan triwulan III dan akan dilakukan pemantauan melalui survey kepuasan masyarakat pengguna jasa pada akhir periode triwulan III tahun 2025.

Pada Sekretariat Ditjen PSDKP mengampu indikator dimaksud di tahun 2025 dan tidak mengampu di tahun anggaran sebelumnya. Nilai survey kepuasan masyarakat di triwulan II tahun 2025 diperoleh dari hasil survey 15 unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yaitu Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang melayani Akses pemantauan kapal perikanan, penerbitan surat aktivasi transmitter dan analisis pergerakan kapal perikanan serta 14 UPT PSDKP yang melayani penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Hasil survey kepuasan masyarakat di unit kerja lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.10 hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan Ditjen PSDKP triwulan II tahun 2025

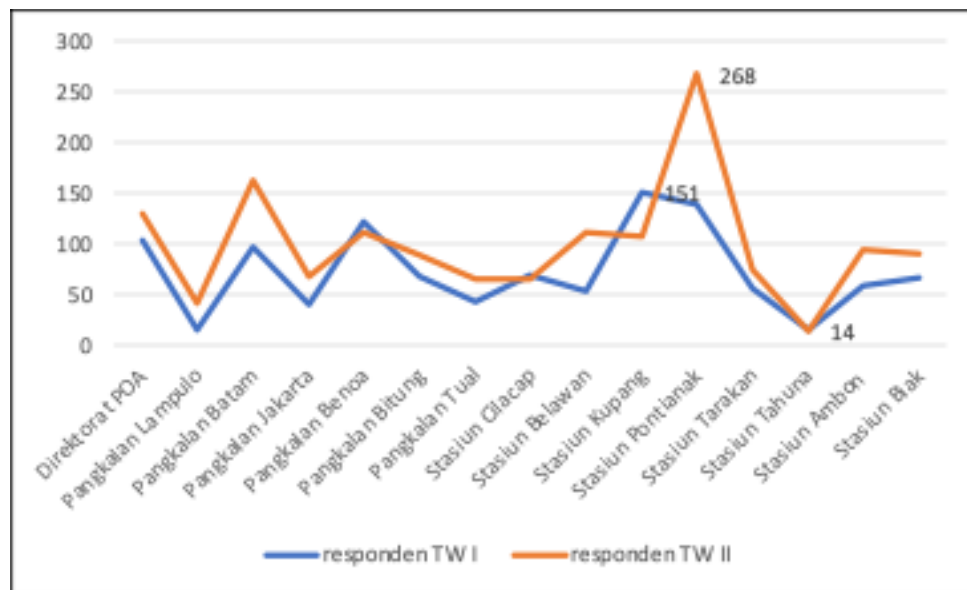
Unit Kerja	TW I		TW II	
	Survey	Responden	Survey	Responden
Direktorat POA	95,35	104	95,04	130
Pangkalan Lampulo	93,70	15	85,91	42
Pangkalan Batam	83,91	97	91,02	163
Pangkalan Jakarta	95,33	41	97,18	68
Pangkalan Benoa	88,66	122	92,29	112
Pangkalan Bitung	92,65	68	94,29	89
Pangkalan Tual	93,22	43	99,19	65
Stasiun Cilacap	83,18	69	92,13	66
Stasiun Belawan	89,37	54	92,34	112
Stasiun Kupang	92,55	151	84,76	107
Stasiun Pontianak	90,92	139	94,40	268
Stasiun Tarakan	91,67	56	91,85	75
Stasiun Tahuna	97,55	15	98,41	14
Stasiun Ambon	94,82	59	92,97	94
Stasiun Biak	99,38	67	100	91
Hasil validasi	92,24	1100	93,27	1496

Terdapat dinamika pada hasil survey dan jumlah responden pada periode triwulan I dan II tahun 2025. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.7



Gambar 3.7 Grafik hasil survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP Tahun 2025

Dari gambar 3.7 dapat dilihat terdapat deviasi sebesar 16,2 dan 15,24 untuk survey tertinggi dan terendah di triwulan I dan triwulan II tahun 2025. Pada periode ini Stasiun PSDKP Biak memegang hasil survey tertinggi yang diperoleh dari 91 responden. Melihat tren triwulan II maka hasil survey kepuasan masyarakat cenderung meningkat dibandingkan triwulan I hampir di seluruh satker PSDKP. Hal ini disebabkan periode pelaksanaan survey triwulan II yang lebih panjang dibandingkan triwulan I. Hal tersebut juga berpengaruh pada jumlah responden yang berpartisipasi, yang rata rata lebih banyak di triwulan II dibandingkan responden yang berpartisipasi di triwulan I, khususnya Stasiun PSDKP Pontianak dengan deviasi partisipasi responden hingga 129 responden sebagaimana disajikan pada gambar 3.8



Gambar 3.8 Grafik responden survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP Tahun 2025

Dari seluruh hasil survey kepuasan masyarakat, untuk Ditjen PDKP telah divalidasi sebesar 93,27 dengan mutu pelayanan kategori **sangat baik**. Target tahun 2025 sebesar 88,5 dan untuk triwulan II sebesar 83 merespon terhadap kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025.

Survey kepuasan masyarakat juga menjumpai kendala tersendiri pada pemahaman responden terhadap pertanyaan survey, sehingga kerap kali responden mengajukan pertanyaan kepada petugas terkait pengisian survey. Selain itu penggunaan gawai untuk menjawab survey juga terkadang menjadi kendala bagi pengguna jasa yang kurang familiar dengan smartphone.

Sebagai upaya penyelesaian maka petugas pelayanan publik Satker selalu siap jika dibutuhkan oleh pengguna jasa untuk membantu proses pengisian survey tanpa mempengaruhi respon yang diberikan oleh pengguna jasa.

ISK 1.1.15 Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Layanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP diantaranya berupa 1) pemberian akses pemantauan kapal perikanan, 2) penerbitan surat keterangan aktivasi transmitter, 3) analisis pergerakan kapal perikanan, 4) penerbitan Surat Laik Operasi (SLO), 5) penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI) yang dievaluasi setiap triwulan oleh para pengguna jasa melalui survey kepuasan masyarakat dan menjadi indikator kinerja

lingkup Ditjen PSDKP baik Pusat di Direktorat POA dan UPT PSDKP. Realisasi indikator kinerja dimaksud lingkup Ditjen PSDKP disajikan pada tabel 3.11

Tabel 3.11 Realisasi nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP									
Tahun	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
		T	R	T	R	T	R	T	R	
2025	88,5	80	92,24	83	93,27	86	-	88,5	-	115,3

Pada Sekretariat Ditjen PSDKP mengampu indikator dimaksud di tahun 2025 dan tidak mengampu di tahun anggaran sebelumnya. Nilai survey kepuasan masyarakat di triwulan II tahun 2025 diperoleh dari hasil survey lima belas unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang melayani SLO, Akses pemantauan perikanan, penerbitan surat aktivasi transmitter dan analisis pergerakan kapal perikanan. Secara lebih detil nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP tersaji pada tabel 3.12

Tabel 3.12 hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan Ditjen PSDKP

Unit Kerja	TW I 2025		TW II 2025	
	Survey	Responden	Survey	Responden
Direktorat POA	95,35	104	95,04	130
Pangkalan Lampulo	93,70	15	85,91	42
Pangkalan Batam	83,91	97	91,02	163
Pangkalan Jakarta	95,33	41	97,18	68
Pangkalan Benoa	88,66	122	92,29	112
Pangkalan Bitung	92,65	68	94,29	89
Pangkalan Tual	93,22	43	99,19	65
Stasiun Cilacap	83,18	69	92,13	66
Stasiun Belawan	89,37	54	92,34	112
Stasiun Kupang	92,55	151	84,76	107
Stasiun Pontianak	90,92	139	94,40	268
Stasiun Tarakan	91,67	56	91,85	75
Stasiun Tahuna	97,55	15	98,41	14
Stasiun Ambon	94,82	59	92,97	94
Stasiun Biak	99,38	67	100	91
Hasil validasi	92,24	1100	93,27	1496

ISK 1.1.16 Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP

Dalam pelayanan publik Ditjen PSDKP yang berupa pemberian akses pemantauan kapal perikanan, penerbitan surat keterangan aktivasi transmitter, analisis pergerakan kapal perikanan, penerbitan Surat Laik Operasi, dan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan dievaluasi dengan survey kepuasan masyarakat atas layanan tersebut yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025. Dalam rangka untuk mendapatkan gambaran kepuasan masyarakat dilakukan pengelolaan survey melalui aplikasi SUSAN KKP yang dapat diakses setiap pengguna jasa melalui <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Pengisian survey dilakukan secara mandiri oleh pengguna jasa layanan. Data hasil survey kemudian dianalisis dan jika terdapat anomali akan ditelusuri untuk penyiapan justifikasi. Data hasil survey dikelola secara terpusat oleh Pusat Data Statistik dan Informasi KKP setelah mendapat konfirmasi hasil survey dari masing-masing eselon I lingkup KKP, untuk Ditjen PSDKP validasi pengisian survey oleh Unit Pelayanan Publik-Dit POA dan UPT PSDKP, dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP.

ISK 1.1.17 Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Untuk lingkup Ditjen PSDKP telah disampaikan 1 usulan Rancangan Kepmen KP tentang RAN IUUF Kedua sebagai tindak lanjut dari Permen KP nomor 93 Tahun 2024 tentang Program PUU KKP tahun 2025. Usulan rancangan Kepmen tersebut saat ini masih dalam proses penyempurnaan oleh Biro Hukum.

Ditjen PSDKP juga telah menyampaikan draft Kepmen KP tentang Hasil Audit Tata Ruang Laut kepada Biro Hukum, dimana Kepmen KP ini tidak masuk dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

ISK 1.1.18 Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP

Indek Kualitas Kebijakan Pemerintah bidang Pengawasan SDKP menjadi salah satu indikator kinerja di lingkup Ditjen PSDKP untuk memantau besaran

dampak kebijakan pada masyarakat kelautan dan perikanan. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dilakukan pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan dalam metadata indikator kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP. Peraturan yang akan diukur dampaknya bagi masyarakat adalah Permen KP Nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan.

ISK 1.1.19 Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP

Sebagai tindak lanjut atas tugas fungsi Sekretariat Ditjen PSDKP sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan NSPK menjadi salah satu indikator kinerja di Sekretariat Ditjen PSDKP. Hingga triwulan II tahun 2025 telah ditetapkan NSPK yang bersifat mengatur yaitu tiga Kepdirjen sebagai berikut:

- a. Spesifikasi Produk Data Informasi Geospasial Lingkup Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada; dan
- c. Penggunaan Tanda Kepangkatan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Tanda Jabatan dan Atribut Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian hingga triwulan II tahun 2025 telah diterbitkan lima Kepdirjen PSDKP sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan SDKP.

ISK 1.1.20 Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Wilayah bebas dari korupsi atau dikenal sebagai WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas nilai 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangannya, dengan persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran. Hingga triwulan II tahun 2025, Ditjen PSDKP telah melaksanakan pemantauan Pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari usulan penilaian Tim Penilai Nasional (TPN). Terdapat tiga unit kerja yang diusulkan, yaitu Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Pangkalan PSDKP Batam, dan Pangkalan PSDKP Bitung dan ketiga unit kerja tersebut lolos administrasi untuk maju penilaian Zona Integritas oleh Tim

Penilai Nasional Kementerian PAN dan RB. Hasil penilaian Zona Integritas unit kerja tersaji pada tabel 3.13

Tabel 3.13 Hasil Evaluasi Zona Integritas Unit Kerja Ditjen PSDKP tahun 2025

Unit Kerja	Area pengungkit	Area Hasil	Nilai Evaluasi
Direktorat POA	49,13	37,41	86,54
Pangkalan PSDKP Batam	44,99	37,37	82,36
Pangkalan PSDKP Bitung	42,58	38,09	80,68

Hingga akhir triwulan II tahun 2025 tengah mempersiapkan unit kerja untuk menghadapi seleksi penialain WBK TPN Tahun 2025 yang meliputi 1) seleksi administrasi, 2) seleksi dokumen (pleno), dan 3) seleksi wawancara.

Sebagai upaya persiapan maka setiap unit kerja dapat merancang bahan untuk pemaparan dan video yang akan dipaparkan jika masuk ke tahap wawancara dengan Tim Penilai Nasional.

ISK 1.1.21 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Penilaian mencakup komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil (Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat WBK antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 80 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi

Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0.

4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.
5. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP

Hingga triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan evaluasi zona integritas pada Direktorat POA, Pangkalan PSDKP Batam dan Pangkalan PSDKP Bitung dengan hasil sebagaimana tersaji pada tabel 3.14

Tabel 3.14 hasil pemantauan awal Inspektorat V untuk evaluasi Zona Integritas

Area Perubahan	Bobot	Nilai		
		Dit POA	UPT Batam	UPT Bitung
A. Pengungkit	60,00			
1. Manajemen Perubahan	8,00	6,47	5,57	5,74
2. Penataan Tata Laksana	7,00	4,84	4,23	5,56
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10,00	7,85	8,07	6,92
4. Penguatan Akuntabilitas	10,00	9,10	7,35	8,85
5. Penguatan Pengawasan	15,00	12,16	11,63	9,40
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,72	8,15	6,11
Total pengungkit		49,13	44,99	42,58
B. Hasil	40,00			
I Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5	19,91	19,91	20,86
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50	17,41	17,41	17,11
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	2,50	2,50	3,75
II Pelayanan publik yang prima	17,50	17,50	17,46	17,24
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	17,50	17,46	17,24
Total hasil		37,41	37,37	38,09
Nilai Evaluasi Zona Integritas		86,54	82,36	80,68

Dari tabel 3.11 dapat dilihat bahwa dari hasil evaluasi zona integritas unit kerja yang diusulkan penilaian TPN oleh Inspektirat V KKP maka ketiga unit kerja yang diusulkan laik diusulkan berpredikat WBK dan laik dievaluasi oleh TPN. Hasil evaluasi tertinggi diraih oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada dengan nilai 86,54 disusul oleh Pangkalan PSKDP Batam dan

Pangkalan PSDKP Bitung. Namun demikian berdasarkan hasil penilaian administrasi dan dokumen, yang lolos untuk penilaian tahap wawancara adalah Direktorat Pengendalian Operasi Armada dan Pangkalan PSDKP Bitung.

Terdapat beberapa kendala saat mengikuti seleksi oleh Tim Penilai Nasional diantaranya pemenuhan dokumen serta penyampaian upaya yang telah dilakukan pada matrik penilaian.

ISK 1.1.22 Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP

Pengelolaan kearsipan Ditjen PSDKP dilaksanakan oleh setiap Satker dan dipantau secara regular. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Ditjen PSDKP secara keseluruhan memperoleh nilai 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan beberapa aksi sebagai berikut:

1. Asistensi dan Verifikasi Data Dukung Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 untuk UPT Lingkup Ditjen PSDKP.
2. Pemusnahan Arsip Stasiun PSDKP Kupang pada 16 Mei 2025 sebanyak 112.354 berkas.
3. Usulan Penghapusan Arsip Setditjen PSDKP sebanyak 1.336 berkas sudah diajukan kepada Biro Umum setelah dilakukan Penilaian Daftar Usul Musnah oleh Arsiparis Setditjen PSDKP dan Arsiparis Biro Umum.
4. Penilaian Daftar Usul Musnah Arsip Stasiun PSDKP Belawan sebanyak 2.065 berkas oleh Arsiparis Setditjen PSDKP dan Arsiparis Biro Umum.
5. Pemindahan Arsip Inaktif ke Gedung Arsip Setditjen PSDKP berdasarkan BA Pemindahan Arsip dari Direktorat PP sebanyak 74 boks arsip dan Direktorat POA sebanyak 43 boks arsip.

Dalam pengelolaan arsip lingkup Sekretaria Ditjen PSDKP dijumpai beberapa kendala sebagai berikut:

1. Empat penyimpanan arsip inaktif (Gedung Arsip) sudah penuh, sedangkan masih akan terus ada pemindahan arsip dari unit pengolah arsip (Eselon II).
2. Selain unit kerja yang memiliki arsiparis nilai hasil pengawasan kearsipan internal yang didapat maksimal hanya dikisaran 88, karena nilai SDM arsiparis memiliki bobot yang lumayan tinggi.

3. Banyak UPT yang masih belum menerapkan peraturan tata naskah dan kearsipan, sehingga pengumpulan data dukung setiap tahunnya kesulitan.

ISK 1.1.23 Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP

Bimtek bidang kesekretariatan dilaksanakan dengan mandatori indikator tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan rencana kegiatan awal tahun 2025 sedianya akan dilaksanakan Bimtek Pengelolaan Kinerja dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024, namun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, maka Bimtek dilaksanakan secara daring dengan penyesuaian pada waktu dan substansi bimtek. Lebih lanjut sebagai penyesuaian agenda untuk menambah kapasitas pemahaman pegawai bidang kesekretariatan, sepanjang triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan NGOBRAS Ngobras (Ngobrol Cerdas Bareng Setditjen PSDKP) yang menghadirkan obrolan santai dan diskusi secara daring seputar kesekretariatan selama 3 jam. Ngobras telah berjalan sebanyak empat edisi dengan dua tema di periode triwulan II tahun yaitu:

1. Rumus Praktis Jago Nulis dan Deteksi Berita Bohong
2. Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Ditjen PSDKP

Selain Ngobras juga telah dilaksanakan peningkatan kemampuan teknis pengawasan kelautan dan perikanan yaitu:

1. Pelatihan Daring ECOSOLVE OSINT Workshop
2. Sharing Pengoperasian Drone dan Pemetaan dengan QGIS
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043

Namun demikian belum dilaksanakan asesmen untuk mengukur tingkat pemahaman peserta yang mengikuti diklat/bimtek tersebut.

ISK 1.1.24 Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP

Tingkat kelulusan diklat teknis bidang manajerial menjadi salah satu indikator kinerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP untuk mengkuantifikasi keberhasilan upaya meningkatkan kapasitas pegawai terkait bidang kesekretariatan. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya akhir tahun anggaran. Hingga triwulan II berakhir tengah dilaksanakan Diklat Dasar Asisten Pengawas Perikanan Terampil sebanyak 4 Angkatan yang diikuti oleh sebanyak 178

dengan penetapan kelulusan peserta dilaksanakan di akhir masa diklat pada Juli 2025.

ISK 1.1.25 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP digadang sebagai salah satu indikator kinerja unggulan sebagai upaya adaptasi Ditjen PSDKP terhadap perubahan dan dinamika birokrasi, layanan dan demand masyarakat pada layanan publik yang ditawarkan oleh Ditjen PSDKP. Indikator kinerja ini dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

Dalam rangka mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB, Ditjen PSDKP mengajukan tiga inovasi unggulan. Ketiga inovasi tersebut meliputi:

1. Sistem Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Berbasis Masyarakat: Integrasi Kearifan Lokal Panglima Laot dalam Pengawasan Kawasan Konservasi di Aceh dari Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan,
2. Sistem Terintegrasi Penanganan Pelanggaran SPKP Stasiun PSDKP Cilacap
3. Detective Cuan dari Stasiun PSDKP Cilacap.

Inovasi-inovasi tersebut diajukan sesuai dengan dua kategori yang ditetapkan panitia, yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Transformasi Digital Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Inovasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Seluruh inovasi Ditjen PSDKP memperoleh nilai 77,88. Nilai ini mencerminkan bahwa ketiga inovasi yang diajukan dinilai memiliki kualitas dan relevansi dalam mendukung peningkatan pelayanan publik. Sehubungan dengan keterbatasan kuota inovasi yang diajukan setiap Kementerian, akan diseleksi 15 (lima belas) inovasi terbaik untuk diajukan ke KIPP tingkat Nasional tahun 2025. Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi, yakni sebagian besar inovasi Ditjen PSDKP masih tergolong sebagai pelayanan publik tidak langsung. Hal ini berkaitan erat dengan peran utama Ditjen PSDKP sebagai lembaga penegak hukum di sektor kelautan dan perikanan. Sementara itu, kompetisi inovasi lebih berfokus pada pelayanan publik yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

ISK 1.1.26 Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP

Pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP merupakan indikator yang dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran. Hingga triwulan II tahun 2025 telah diajukan inovasi lingkup Ditjen PSDKP untuk mengikuti seleksi lingkup KKP dimana inovasi yang lolos seleksi akan diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian POAN dan RB.

ISK 1.1.27 Nilai implementasi program budaya kerja

Program Budaya Kerja di lingkungan Ditjen PSDKP merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan nilai-nilai budaya kerja internal, yaitu PILAR PSDKP, dengan budaya kerja ASN nasional, yakni BerAKHLAK. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan visi dan semangat kerja di seluruh jajaran Ditjen PSDKP. Sebagai bagian dari proses ini, capaian indikator kinerja budaya kerja diukur pada akhir tahun anggaran. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, Ditjen PSDKP sedang memfinalisasi penyusunan draft Keputusan Direktur Jenderal tentang pembentukan Tim Budaya Kerja yang akan bertanggung jawab atas implementasi budaya kerja secara berkelanjutan.

Tim Budaya Kerja akan dibentuk di setiap unit kerja dengan struktur organisasi yang mencakup unsur Pengarah, Komite, dan Pelaksana di tingkat satuan kerja (Satker). Pembentukan tim ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Ditjen PSDKP. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan beberapa kegiatan budaya kerja. Meskipun demikian, komitmen untuk menanamkan nilai-nilai budaya kerja yang konsisten tetap dijaga sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang profesional dan berintegritas tinggi.

ISK 1.1.28 Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal PSDKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

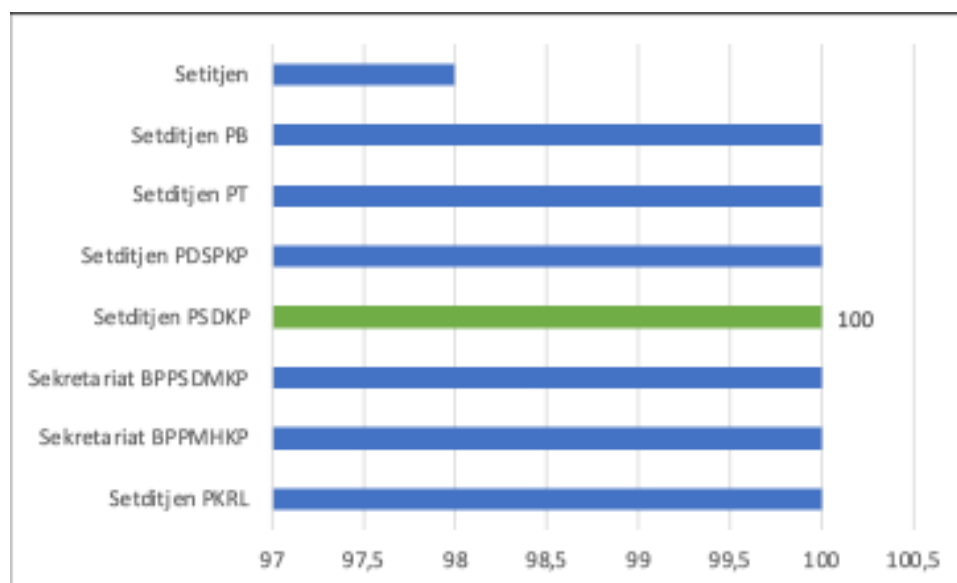
Penyampaian keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan melalui media *online* maupun *offline*. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keterbukaan pelayanan informasi publik Ditjen PSDKP adalah:

1. Menyediakan layanan keterbukaan informasi publik
2. Membuat SK Tim PPID dengan melibatkan seluruh UPT PSDKP
3. Menindaklanjuti informasi masyarakat

Dalam melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi publik, ditemukan kendala pada media layanan whatsapp business yang sejak Maret 2025 tidak lagi efektif sebagai dampak efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.

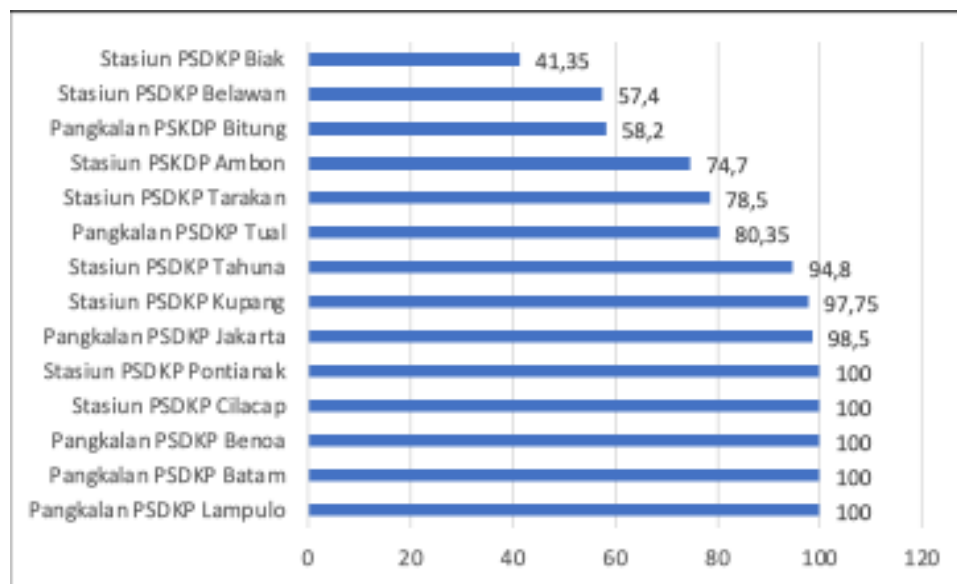
Sepanjang triwulan II tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ditjen PSDKP melayani sebanyak 164 permohonan informasi publik yang terdiri dari 5 permohonan aduan langsung dan bersurat, 41 permohonan berasal dari WhatsApp Official, 21 permohonan berasal dari Aplikasi PPID dan 96 permohonan berasal dari media sosial. Rata-rata waktu penyelesaian terhadap permohonan informasi publik masih sesuai dengan PerKI SLIP yaitu di bawah 7 hari kerja.

Pada Juni 2025 juga telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik lingkup Ditjen PSDKP yang diinisiasi oleh Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri KKP. Hasil monitoring dan evaluasi data dilihat pada gambar 3.8



Gambar 3.8 Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik eselon I lingkup KKP tahun 2025

Sekretariat Ditjen PSDKP memperoleh penghargaan sebagai PPID Pelaksana Eselon I terbaik (Peringkat 3) dengan nilai 100 predikat Informatif. Sedangkan untuk unit kerja teknis dirangkum sebagaimana tersaji pada gambar 3.9



Gambar 3.9 Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik UPT PSDKP tahun 2025

Hasil penilaian keterbukaan informasi publik lingkup KKP tahun 2025, Pangkalan PSDKP Lampulo meraih penghargaan sebagai PPID Pelaksana UPT Terbaik (Peringkat 7) lingkup KKP. Lebih lanjut, dari 15 Unit Kerja lingkup KKP, 9 Unit Kerja yang meraih predikat Informatif adalah Sekretariat Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Pontianak, Pangkalan PSDKP Jakarta, Stasiun PSDKP Kupang, dan Stasiun PSDKP Tahuna. Sedangkan unit kerja yang meraih predikat Menuju Informatif adalah Pangkalan PSDKP Tual. Predikat Cukup Informatif diraih oleh Stasiun PSDKP Tarakan dan Stasiun PSDKP Ambon, sedangkan unit kerja dengan Predikat Kurang Informatif adalah Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Belawan, dan Stasiun PSDKP Biak.



Gambar 3.10 Sekretariat pelayanan informasi dan dokumentasi Ditjen PSDKP

Dari hasil evaluasi diidentifikasi performa UPT PSDKP dalam penyajian informasi seputar pengawasan kelautan dan perikanan sangat beragam, dan kendala untuk UPT PSDKP yang berpredikat cukup informatif dan kurang informatif dikarenakan SDM pengelola data informasi publik belum mendapatkan pendampingan yang memadai. Sebagai upaya perbaikan pada triwulan III tahun 2025 akan dilaksanakan monev internal Ditjen PSDKP sekaligus pendampingan ke UPT PSDKP. Lebih lanjut akan dilaksanakan beberapa aksi sebagai berikut:

1. Penataan ruang pelayanan PPID Sekretariat Ditjen PSDKP agar lebih mudah terlihat jika masyarakat ingin mengajukan permohonan informasi publik secara langsung.
2. Pembaharuan dokumen informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait pengawasan kelautan dan perikanan.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi PPID akan lebih ditingkatkan, melihat interaksi masyarakat mulai optimal melalui jumlah permintaan informasi dan dokumentasi di aplikasi yang mengalami peningkatan.

ISK 1.1.29 Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP

Ditjen PSDKP dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memanfaatkan data pengawasan yang dikelola secara komprehensif, mulai dari perolehan data secara manual untuk kemudian diolah secara menyeluruh dengan sistem informasi pengawasan, menghasilkan beragam output diantaranya data keragaan pengawasan SDKP, PSDKP dalam angka, sistem informasi pengawasan dan sistem informasi perkantoran modern. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya di akhir tahun anggaran.

Setiap output tersebut merupakan pengelolaan data yang berkesinambungan antara data keragaan PSDKP dan PSDKP dalam angka serta pengelolaan berkesinambungan antara sistem informasi pengawasan dan sistem informasi perkantoran modern, yang seluruhnya dimulai dari perencanaan data yang dibutuhkan/dikelola, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian data. Khusus untuk sistem informasi terdapat aspek perancangan/pembangunan sistem data dan kebermanfaatan pada unit kerja melaksanakan tugas pengawasan SDKP. Pada periode triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan pengelolaan data dan informasi.

ISK 1.1.30 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP

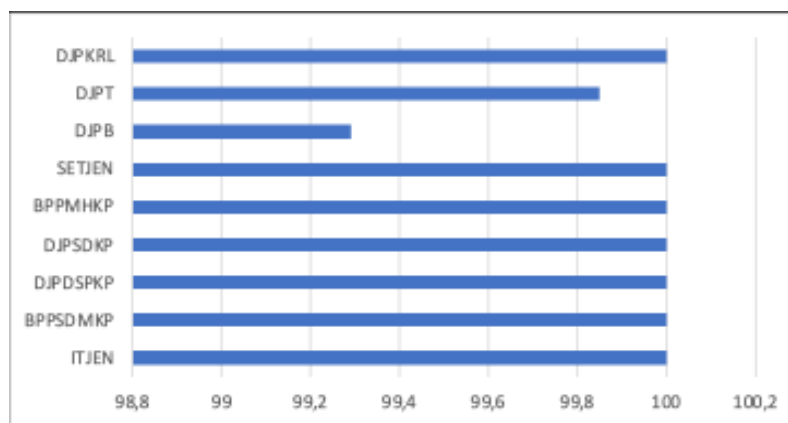
Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Aplikasi SIRUP) Ditjen PSDKP dan merupakan upaya optimalisasi kinerja perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) Triwulan II Tahun 2025. Langkah ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengadaan yang terdampak efisiensi belanja anggaran serta memastikan bahwa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan tidak diumumkan pada Aplikasi SIRUP. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum ada sandingan capaian kinerja.

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Realisasi indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.15

Tabel 3.15 realisasi persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP tahun 2025

Indikator kinerja	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP Tahun 2025					
	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
2025	76	99,93%	100%	-	-	120%

Hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase RUP di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang diumumkan pada Aplikasi SIRUP Triwulan II Tahun anggaran 2025 adalah 100%. Dari 15 Satker seluruhnya tepat 100% dalam melaksanakan pengumuman pengadaan. Untuk persentase RUP lingkup KKP dapat dilihat pada gambar 3.11



Gambar 3.11 Grafik Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diunggah pada aplikasi SIRUP lingkup KKP Triwulan II tahun 2025

Sebagai upaya optimalisasi rencana umum pengadaan lingkup Ditjen PSDKP, pada periode triwulan II tahun 2025 telah dilakukan moneyv berkala untuk penginputan RUP Satker lingkup Ditjen PSDKP dan pembuatan kertas kerja efisiensi.

Adapun kendala yang dialami dalam perhitungan persentase RUP yang diumumkan pada Aplikasi SIRUP adalah dengan adanya blokir anggaran maka pagu yang diumumkan tidak sama dengan pagu pengadaan, sehingga perlu konfirmasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ISK 1.2.1 Persentase implementasi kerja sama luar negeri

Implementasi kerjasama luar negeri adalah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan melibatkan dua belah pihak atau lebih mitra luar negeri untuk mencapai tujuan bersama khususnya dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP. Bentuk kerjasama dapat berupa pertemuan bilateral, pertemuan regional/multilateral, workshop/FGD/seminar yang dilaksanakan sebagai hasil kerjasama luar negeri. Ditjen PSDKP menjalin kerjasama dengan organisasi dan negara lain untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia khususnya Ditjen PSDKP aktif menangani permasalahan di wilayah regional dan internasional khususnya yang terkait konflik wilayah perbatasan, pemberantasan IUUF, capacity building baik pegawai maupun Masyarakat serta peningkatan penyadartahuan masyarakat. indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

Hingga akhir Triwulan II 2025 kinerja implementasi kerjasama luar negeri sebagai berikut:

1. Koordinasi rutin dan pembahasan rencana aksi antara Direktorat Jenderal PSDKP dengan *Australian Border Forces* (ABF) dalam kerangka *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum*, diantaranya adalah (i) pembahasan rencana pelaksanaan Patroli Jawline-Arafura 2025 dan *Port Visit* ke Darwin, (ii) pembahasan rencana pelaksanaan pertemuan *2nd Combined Coordination Group* di Australia, (iv) pembahasan rencana pertemuan pimpinan tertinggi *Maritime Border Command* (MBC) ke Ditjen. PSDKP, (v) partisipasi perwakilan Ditjen. PSDKP pada kegiatan peningkatan kapasitas yang difasilitasi oleh ABF, serta (vi) pertukaran data informasi reguler tentang nelayan yang diduga melakukan kegiatan melintas batas perairan Australia.
2. Partisipasi delegasi Ditjen. PSDKP pada forum internasional terkait substansi *IUU Fishing* diantaranya:
 - a. *Civil Maritime Security Program* (CMSP) pada bulan April sampai dengan Juni 2025 di Canberra, Australia.
 - b. *Training Course on Fisheries MCS in Southeast Asia* pada tanggal 4 sampai dengan 24 Mei 2025 di Nha Trang, Vietnam.
 - c. *The 14th MCS Sub-Regional (Arafura and Timor Seas) Group Meeting* pada tanggal 22 sampai dengan 25 April 2025 di Australia.
 - d. *International Seaport and Border Interdiction Training ILEA* pada tanggal 2 sampai dengan 6 Juni 2025 di Bangkok, Thailand.
 - e. *Fisheries Officer Exchange 2025* pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2025 di Thailand.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian jadwal koordinasi antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan mundurnya waktu pelaksanaan beberapa kegiatan. Selain itu, tingkat keaktifan mitra kerja sama juga menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran implementasi rencana aksi.

Sebagai upaya tindak lanjut, telah dilakukan langkah-langkah strategis, antara lain dengan lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan mitra kerja sama serta mencari alternatif atau pendekatan komunikasi yang lebih relevan dan efektif untuk mengatasi hambatan yang ada.

Sebagai bagian dari rencana kerja Triwulan berikutnya, direncanakan untuk melaksanakan kegiatan berikut:

1. Pelatihan Tingkat Regional untuk Petugas Maritim Sipil, melanjutkan program yang telah berjalan sebelumnya.

2. Pertukaran Data Nelayan Pelintas Batas, guna memperkuat implementasi kebijakan yang telah dirintis di tahun sebelumnya.
3. Pelaksanaan Patroli Bersama Jawline-Arafura 2025.

Dengan pelaksanaan rencana kerja yang lebih matang serta koordinasi yang semakin intensif, diharapkan capaian kinerja kerja sama luar negeri pada periode berikutnya dapat terus meningkat secara signifikan.

ISK 1.2.2 Persentase dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani

Selain kerjasama internasional, Ditjen PSDKP juga menjalin kerjasama dalam negeri dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan lembaga non pemerintah untuk mendukung kinerja pengawasan SDKP. Ruang lingkup kerjasama dalam negeri adalah Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan dan rencana aksi kerjasama. Indikator kinerja ini juga dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

Keberhasilan pelaksanaan kerja sama dalam negeri didukung oleh tercapainya penandatanganan dokumen penting, seperti keaktifan dalam menyusun dokumen kerja sama yang selaras dengan kebutuhan kedua belah pihak menjadi faktor utama keberhasilan. Namun demikian terdapat kendala pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama tidak dilakukan secara reguler, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas implementasi kerja sama. Untuk pelaporan implementasi kerja sama masih kurang aktif, sehingga sulit untuk memantau keberlanjutan dan dampak kerja sama.

Sebagai upaya perbaikan direkomendasikan untuk dapat melakukan upaya:

1. Monitoring dan evaluasi secara reguler terhadap pelaksanaan kerja sama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
2. Mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan implementasi kerja sama.
3. Lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan mitra kerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan serta mempercepat penyelesaian dokumen kerja sama.

Pelaksanaan kerja sama, seperti penandatanganan dokumen dengan mitra kerja strategis (universitas dan pemerintah daerah), menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran. Namun, keterbatasan dalam monitoring dan evaluasi reguler mengindikasikan adanya potensi inefisiensi dalam pengelolaan kerja sama yang sudah berjalan.

Kegiatan yang dilakukan sepanjang triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen. PSDKP dengan IOJI tentang Dukungan PSDKP tanggal 5 Juni 2025.
2. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen. PSDKP dengan Ditjen. Perhubungan Udara tentang Sinergi Pelaksanaan PSDKP tanggal 5 Juni 2025.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PSDKP dan Yayasan WWF Indonesia tanggal 5 Juni 2025
4. Analisis dan perpanjangan perjanjian kerja sama yang akan berakhir pada awal tahun 2025.

ISK 1.2.3 Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU

RPOA IUU sebagai inisiatif regional disepakati tahun 2007 di Bali oleh 11 negara antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan Viet Nam, untuk mempromosikan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab termasuk mendorong penguatan pemberantasan IUU fishing. Indonesia sebagai Sekretariat RPOA-IUUF sejak tahun 2009 sampai saat ini, dengan ruang lingkup kegiatan memfasilitasi pelaksanaan Annual Workplan yang melibatkan negara-negara peserta RPOA-IUU diantaranya adalah pertemuan *Coordination Committee Meeting (CCM)*, pertemuan *Consultative Meeting (CM)*, adopsi dokumen oleh negara peserta dan Workshop/FGD/Pelatihan/Seminar yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama RPOA-IUU. Komponen yang digunakan untuk mendapat Gambaran kinerja Sekretariat RPOA-IUUF adalah layanan Sekretariat, pelaksanaan tahapan kegiatan annual workplan dan pelaksanaan tahapan adopsi dokumen. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

Sepanjang periode Triwulan II Tahun 2025 kinerja layanan kesekretariatan dan rencana kerja tahunan Sekretariat diantaranya:

1. Menyusun dan merancang bahan publikasi RPOA-IUU yang meliputi *newsletter*, *social media content*, dan *website* untuk edisi kuartal 2 tahun 2025;
2. Memformulasikan proposal dan rencana kegiatan untuk pendanaan dari Pemerintah Kanada terkait dengan pelatihan teknis untuk penguatan *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS)*;
3. Menjalin komunikasi dengan Pemerintah Australia mengenai tindak lanjut dari proposal yang diajukan oleh Sekretariat RPOA-IUU;

4. Mengembangkan dan merancang *concept note* terkait dengan *decent working condition on fishing vessels and fishing industry* dilanjutkan berkorespondensi dengan International Labour Organization (ILO);
5. Memfasilitasi negara partisipan RPOA-IUU dalam penyelenggaraan *Fisheries MCS Training Course, Fisheries Officer Exchange* serta menyusun dokumen-dokumen pendukung;
6. Memperbaharui *RPOA-IUU Watch List* yang sudah diintegrasikan oleh informasi dari *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*;
7. Memperbaharui *MCS Key Instrument Lists* sebagai sarana pertukaran data dan informasi terkait progress negara dalam mengimplementasikan instrumen regional dan internasional.

Sebagai rencana kegiatan pada periode selanjutnya diantaranya sebagai berikut:

1. Melanjutkan penyusunan *RPOA-IUU Newsletter* berbasis kuartal dengan bekerjasama dengan RPOA-IUU partners.
2. Mengoptimalkan *RPOA-IUU Website* dan *RPOA-IUU Knowledge Management Platform*
3. Menyelenggarakan *consultative meeting* untuk membahas *evaluation and reporting tools* dan *data-sharing mechanism*;
4. Bekerjasama dengan *Australian Government* dalam mempromosikan program SEA-IUU fishing serta memfasilitasi negara partisipan RPOA-IUU dalam kegiatan program tersebut di tahun 2025;
5. Menyelenggarakan beberapa forum regional yang fokus pada implementasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan pemberantasan *IUU fishing*.

Program-program tersebut tidak hanya mendukung upaya pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kolaborasi antar negara anggota sebagai tindak lanjut, Sekretariat merencanakan beberapa program prioritas untuk periode mendatang, antara lain:

1. *Regional MCS Training Course 2025*
2. *Fisheries Officer Exchange 2025*
3. *RPOA-IUU Consultative Meeting*
4. *Regional Workshops*
5. *RPOA-IUU Coordination Committee Meeting ke-18*
6. *Partners Coordination Meeting*

Rencana ini diharapkan dapat lebih mempererat kerja sama regional, meningkatkan kapasitas negara anggota, serta memperkuat mekanisme

pengawasan dan koordinasi dalam rangka pemberantasan IUU fishing di kawasan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh negara anggota, didukung oleh program kerja yang terarah dan kolaborasi yang sinergis, Sekretariat RPOA-IUUF optimis dapat terus mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

C. EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, sepanjang triwulan II tahun 2025 telah dilakukan upaya efisiensi sebagai tindak lanjut arahan presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Anggaran pada Sekretariat Ditjen PSDKP di awal tahun anggaran 2025 telah mengalami efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan belanja operasional perkantoran. Sebagai rasionalisasi efisiensi anggaran maka diimplementasikan kebijakan work from anywhere di lingkup KKP yang juga diimplementasikan di lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP. Selain itu untuk mengefektifkan waktu, tenaga dan biaya selama beberapa pekan dilaksanakan Ngobras (Ngobrol Cerdas Bareng Setditjen PSDKP) di lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP yang mengangkat beragam tema seputar layanan dukungan manajerial untuk pengawasan kelautan dan perikanan. Hingga triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan empat sesi Ngobras yang diselenggarakan secara daring.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sekretariat Ditjen PSDKP melaksanakan dprogram dukungan manajemen untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan dukungan anggaran di awal tahun 2025 sebesar Rp114.096.426.000,00 dengan realisasi hingga triwulan II sebesar Rp41.184.490.443,00. Rincian realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP pada triwulan II tahun 2025 sebagai mana tertera pada tabel 3.16

Tabel 3.16 Realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP program Dukungan Manajemen triwulan II tahun 2025

APBN Perubahan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	59.012.285.000	51.923.426.000	3.160.715.000	114.096.426.000
Realisasi	33.229.884.465	7.912.966.038	41.639.940	41.184.490.443
Besaran realisasi	56,31%	15,24%	1,32%	36,10%

Selain pagu dan realisasi tertera pada tabel 3.13, Sekretariat Ditjen PSDKP juga mendapatkan alokasi pagu PNBP sebesar Rp68.428.441.000,00 namun demikian untuk dapat memanfaatkan PNBP, target penerimaan perijinan kapal perikanan pada Ditjen Perikanan tangkap harus dapat terpenuhi terlebih dahulu.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Atas hasil penghitungan dan analisis capaian kinerja triwulan II tahun 2025 Sekretariat Ditjen PSDKP dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai kinerja organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan II tahun 2025 sebesar 109,01% dari kontribusi tiga puluh tiga indikator sasaran kegiatan yang dihitung capaian kinerjanya dari dua sasaran kegiatan.
2. Dari ketiga puluh tiga indikator sasaran kegiatan tersebut, terdapat sembilan indikator kegiatan yang dihitung capaian kinerjanya pada triwulan II tahun 2025, yaitu 1) Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP, 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP, 3) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, 4) Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP, 5) Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP, 6) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP, 7) Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP, 8) Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai IKPA, dan 9) Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP.
3. Dari kesembilan indikator tersebut, terdapat lima indikator dengan capaian kinerja istimewa dengan persentase capaian kinerja diatas 110%.
4. Ditengah kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, pagu APBN Sekretariat Ditjen PSDKP sebesar Rp114.096.426.000,00 telah terealisasi untuk mendukung kegiatan kesekretariatan hingga triwulan II tahun 2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp41.184.490.443,00 (persentase 36,10%), capaian ini selaras dengan Rencana Penarikan Dana anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP dengan didominasi gaji dan tunjangan pegawai ASN, PPPK dan PJLP.

B. SARAN

Berdasarkan hasil monitoring atas capaian kinerja interim triwulan II tahun 2025, secara umum tidak terdapat kendala berarti yang menghambat kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP, namun demikian direkomendasikan untuk tetap memantau kinerja sebelum berakhir triwulan III tahun 2025 sebagai persiapan penghitungan kinerja pada periode berikutnya.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharta

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

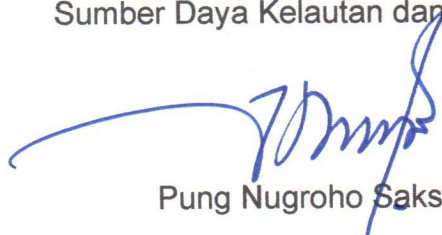
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP



Suharta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	71,5
	2. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran	100%
	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92
	4. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA (%)	100
	5. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77
	6. Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	95%
	7. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81
	8. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88
	9. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,35
	10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%
	11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	85%
	12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%
	13. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5
	14. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP	88,5
	15. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5
	16. Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100%
	17. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%
	18. Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70
	19. Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100%
	20. Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK	16
	21. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	80

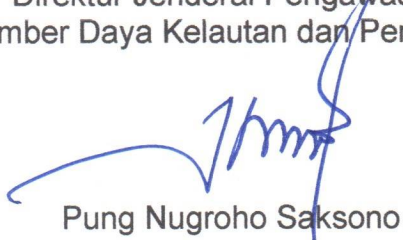
		22. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP (nilai)	80
		23. Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78
		24. Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP	83
		25. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	1
		26. Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP (%)	100%
		27. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70
		28. Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	60
		29. Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80
		30. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76
		31. Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri	80%
2.	Terselenggaranya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif	32. Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani	80%
		33. Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	114.096.426.000
Total Anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP Tahun 2025		114.096.426.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP



Suharta



SEKRETARIAT DITJEN PSDKP
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN